

**PENGARUH KOMPETENSI KOMITE AUDIT TERHADAP PENYISIHAN
PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
Studi Empiris Pada Bank yang Terdaftar di BEI**

TESIS

**ZULFITRY RAMDAN
0706169511**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
JAKARTA
DESEMBER 2008**

T
25/10



**PENGARUH KOMPETENSI KOMITE AUDIT TERHADAP PENYISIHAN
PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
Studi Empiris Pada Bank yang Terdaftar Di BEI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Manajemen**

**ZULFITRY RAMDAN
0706169511**



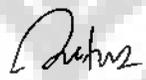
**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KEUANGAN
JAKARTA
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Zulfitriy Ramdan

NPM : 0706169511

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Desember 2008

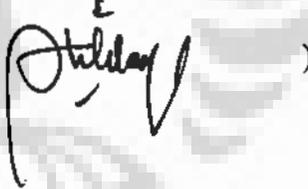
HALAMAN PENGESAHAN

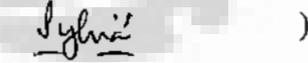
Karya Akhir ini diajukan oleh :
Nama : **Zulfitriy Ramdan**
NPM : 0706169511
Program Studi : **MAGISTER MANAJEMEN**
Judul Karya Akhir : Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Studi
Empiris Pada Bank yang Terdaftar di BEI.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Ancella A. Hermawan, MBA** ()

Penguji : **Hilda Rossieta, Ph.D.** ()

Penguji : **Dr. Sylvia Veronica NPS.** ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Sujud syukur dan ucapan hamdalah ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan karya akhir yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar di BEI”**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rhenald Kasali, PhD selaku Ketua Program Studi MM-FEUI.
2. Ancella A Hermawan, MBA. selaku Dosen Pembimbing Karya Akhir yang telah bersedia memberikan ilmu dan nasihat mulai dari persiapan penelitian sampai penyusunan karya akhir ini selesai.
3. Seluruh Staf Dosen, Administrasi, Perpustakaan dan Staff pendukung lainnya di MM-FEUI yang telah bekerja sama dan memberikan bantuan selama proses belajar dan penyelesaian karya akhir ini.
4. Keluarga saya (Papa, Mama, Kakak Nika, Aa Budi, Dala) yang selalu memberikan doa dan dukungan.
5. Seluruh teman-teman MMUI umumnya, serta sahabat-sahabat angkatan 07 pada khususnya.

Jakarta, 16 Desember 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfitriy Ramdan
NPM : 0706169511
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar di BEI

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2008

Yang menyatakan,



(Zulfitriy Ramdan)

ABSTRAK

Nama : Zulfitriy Ramdan
Program Studi : Magister Manajemen
Judul : Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar di BEI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagai proyeksi manajemen laba. Kompetensi yang dimiliki oleh Komite Audit sebagai variabel ukur adalah kompetensi dalam bidang akuntansi yang dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 21 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah melaporkan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2006-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dipengaruhi secara signifikan dengan koefisien regresi negatif oleh latar belakang pendidikan akuntansi, sedangkan dua variabel indikator lainnya yaitu pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

Keywords : Audit Committee; Accounting Expertise; loan loss provisions

ABSTRACT

Nama : Zulfity Ramdan
Program Studi : Magister Management
Judul : The Effect of Committee Audit Competence of Loan Loss Provisions Empirical Study on Bank listed at BEI

The effect of committee audit competence of loan loss provisions as a projection of earning management. The competence of audit committee as a measure variable is the competence in accounting that valued based on accounting background, experience works as auditor in accounting firm and work experience in Accounting division. Sample in this research contains 21 banks that listed in IDX that already submit the completed financial report for 2006-2007. The result of this research shows that loan loss provisions is significantly affected with negative coefficient regression by accounting academic background, thus the other 2 variables that is work experience in KAP and work experience in a firm in accounting division shows no significant effect.

Keywords : Audit Committee; Accounting Expertise; loan loss provisions

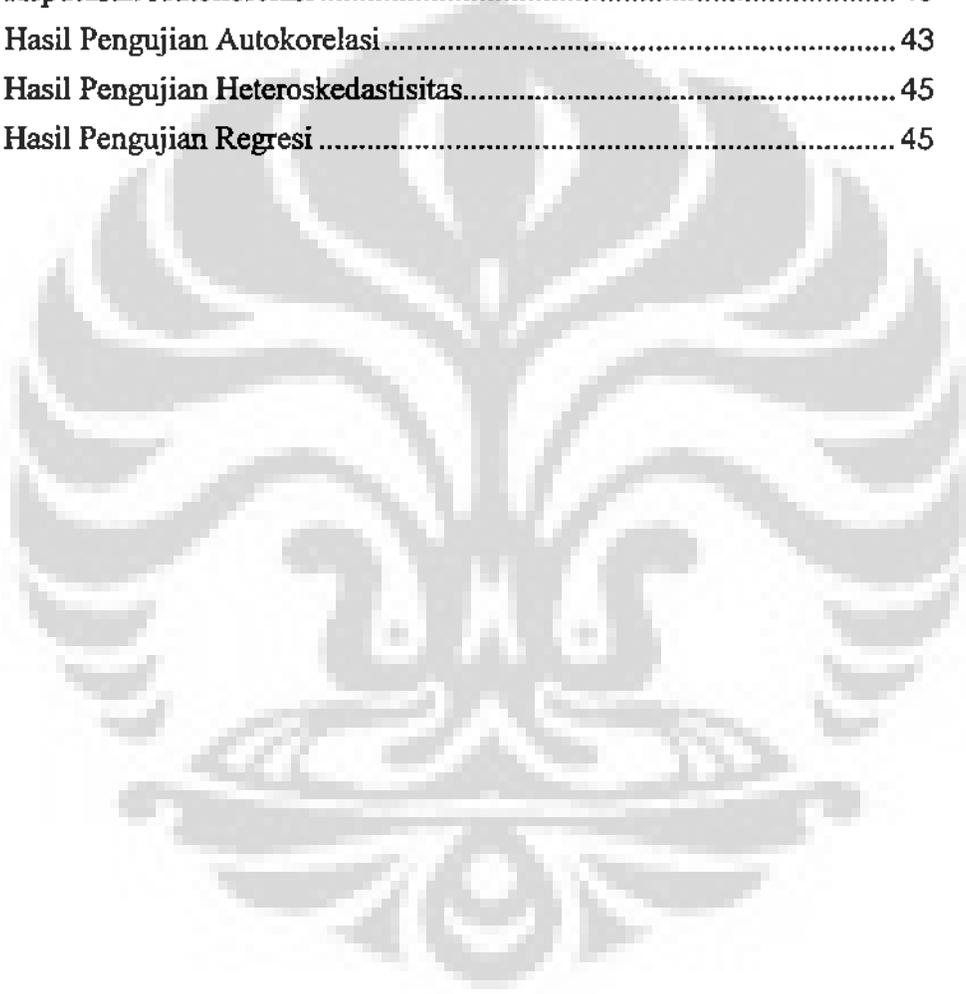
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 <i>Corporate Governance</i>	7
2.1.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i>	7
2.1.2 Perkembangan <i>Corporate Governance</i>	8
2.1.3 Tujuan dan Manfaat GCG.....	10
2.1.4 Prinsip-Prinsip Umum OECD Mengenai <i>Corporate Governance</i>	11
2.2 Penerapan GCG di Perbankan.....	12
2.3 Komite Audit.....	14
2.3.1 Pengertian Komite Audit	14
2.3.2 Peran Komite Audit.....	15
2.3.3 Keanggotaan Komite Audit	16
2.4 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	19
2.4.1 Pengertian Aktiva Produktif.....	19
2.4.2 Pengertian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.....	20
2.4.3 PPAP dan Manajemen Laba	22
2.4.4 Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba	23
2.4.5 Kualitas Audit dan Manajemen Laba	23

3	METODE PENELITIAN	25
3.1	Kerangka Pemikiran.....	25
3.2	Pengembangan Hipotesis	26
3.3	Model Penelitian	27
3.4	Metode Penelitian.....	28
3.5	Variabel Penelitian dan Pengukurannya	29
3.6	Definisi Variabel Operasional.....	30
3.7	Teknik Pengumpulan Data	31
3.8	Metode Analisis Data.....	32
4	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	37
4.1.	Statistik Deskriptif	37
4.2.	Uji Normalitas.....	39
4.3.	Pengujian Asumsi Klasik.....	41
4.3.1	Uji Multikolinearitas	41
4.3.2	Uji Autokorelasi.....	42
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.4.	Analisa Regresi	45
4.4.1	Pengujian Simultan (uji F).....	46
4.4.2	Goodness of-Fit Model (Adj. R2).....	46
4.4.3	Uji t ACCTGED.....	46
4.4.4	Uji t EXPERTKAP	47
4.4.5	Uji t EXPERTACCTG.....	48
4.4.6	Uji t Variabel Kontrol SIZE dan KAP	48
5	KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	51
5.3	Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	53
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel.....	32
Tabel 3.2 Kriteria Keputusan Uji Autokorelasi.....	35
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Normalitas.....	40
Tabel 4.3 Pengujian Multikolinearitas	42
Tabel 4.4 Keputusan Autokorelasi	43
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	43
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	45
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Regresi	45



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Indonesia mengalami masalah krisis ekonomi yang serius akibat banyaknya petinggi perusahaan yang melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), fenomena ini memberikan bukti nyata atas lemahnya penegakan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. Seharusnya keberadaan GCG dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan GCG masuk kedalam proses dan struktur pengelolaan bisnis perusahaan, dan sesuai dengan *stewardship theory*, bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia justru menjadi lahan subur bagi oknum-oknum tingkat atas untuk melakukan praktik menyimpang, yang akhirnya mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan. Sedangkan Tujuan utama GCG adalah mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain, sehingga belakangan ini penerapan GCG berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 1988, pemerintah bersama BI melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian pula dengan ijin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Suatu kemudahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dunia perbankan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat

kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta. Pakto 88 mulai menampakkan dampak negatifnya karena tidak adanya mekanisme GCG dalam pengelolaan bank. Kebebasan perbankan terutama dalam bank devisa serta banyaknya bank yang mengalami kredit macet, merupakan sebagian faktor yang menghambat terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan terbentuknya Dewan Komisaris serta komite-komite di bawahnya, yang merupakan bagian dari penerapan GCG di perusahaan. Dewan Komisaris memegang penting dalam terwujudnya mekanisme pengendalian (*control*) dari dalam perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena Dewan komisaris merupakan wakil dari pemegang saham yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi *advisory* kepada pihak direksi dalam hal pengelolaan perusahaan.

Salah satu komite di bawah Dewan Komisaris yang memegang peranan penting dalam penerapan GCG adalah Komite Audit. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu peran Komite Audit dalam mewujudkan GCG adalah mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai dan meningkatkan kualitas *disclosure* laporan keuangan. Dengan GCG pemegang saham mempunyai keyakinan bahwa uang yang di investasikannya terlindungi sehingga mereka yakin akan keputusan investasinya.

Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank, sehingga BI dapat menetapkan apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak. Agar suatu bank memenuhi kriteria sebagai bank sehat, manajemen mempunyai kewenangan untuk melakukan manajemen laba yaitu suatu langkah yang dimaksudkan untuk memperbaiki laporan keuangan tahunan dengan meningkatkan ataupun menurunkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Karena adanya kebijakan manajemen laba maka diperlukan mekanisme yang dapat menjaga stabilitas kebijakan tersebut. Mekanisme yang dapat digunakan adalah optimalisasi penerapan *Good Corporate Governance* di sektor

perbankan. Bagi perusahaan perbankan, pelaksanaan GCG melalui pembentukan Komite Audit sangat diperlukan dikarenakan sistem perbankan adalah salah satu indikator yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Bila sistem perbankan tidak berfungsi dengan baik maka akan memberikan *negative multiplier effect* yang besar terhadap kinerja sistem ekonomi yang lainnya, diantaranya adalah terhambatnya pertumbuhan sektor riil, tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi (Syakhroza,2002).

Penelitian ini fokus pada satu industri dan satu laporan yang nilainya ditentukan oleh kewenangan manajemen. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa bank menggunakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif untuk melakukan manajemen laba (Beatty, Chamberlain and Magliolo, 1995; Beatty, Ke and Petroni, 2002; Ahmed et al. 1999). Penelitian ini menggunakan nilai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atas kredit yang diberikan bank, karena Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar.

Komite Audit sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan tentunya sangat berperan penting dalam hal penetapan kebijakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif suatu bank, kompetensi yang mereka miliki dibidang akuntansi akan menentukan sejauh mana kemampuan mereka dalam mengawasi manajemen untuk mengelola suatu bank, sehingga secara garis besar kinerja mereka turut menentukan tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya mencerminkan kondisi perekonomian negara Indonesia.

Penelitian tentang kompetensi komite audit telah dilakukan oleh Mc Mullen dan Randghun (1996), dalam penelitiannya mereka menyimpulkan adanya hubungan yang positif antara kompetensi Komite Audit dengan kemungkinan menurunnya *earning management*.

Penelitian ini menggunakan Kompetensi dibidang akuntansi karena dengan memiliki kompetensi dibidang akuntansi Komite Audit mempunyai beberapa keterampilan seperti: (i) kemampuan untuk memahami laporan keuangan serta prinsip akuntansi umum; (ii) kemampuan untuk mengkaji aplikasi

umum dari beberapa prinsip akuntansi akrual (iii) pengalaman dalam auditing dan analisa laporan keuangan; (iv) kemampuan untuk memahami pengawasan intern serta prosedur-prosedur untuk pelaporan laporan keuangan; dan (v) kemampuan untuk memahami fungsi komite audit.

Menurut McDaniel et al., (2002) Komite Audit yang ideal adalah yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan proses audit untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam hal proses pelaporan laporan keuangan, mengenali permasalahan, dan menanyakan permasalahan yang terjadi kepada manajemen dan auditor. Dhaliwal et al (2007), menemukan Komite Audit dengan keahlian akuntansi berhubungan positif dengan kualitas *accrual*. Dengan keahlian di bidang akuntansi membuat mereka lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab sebagai Komite Audit untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini bermaksud untuk membahas lebih lanjut mengenai “Pengaruh Kompetensi Komite Audit Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar di BEI ”

1.2 Perumusan Masalah

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Salah satu isi peraturan ini mengatur keanggotaan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Peraturan tersebut mensyaratkan paling tidak satu orang dari anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit harus memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan bank dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip GCG dan tidak melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi tingkat modalnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Bank dengan Komite Audit yang memiliki Latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih sedikit melakukan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ?

2. Apakah Bank dengan Komite Audit yang memiliki Pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik akan lebih sedikit melakukan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif?
3. Apakah Bank dengan Komite Audit yang memiliki Pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang Akuntansi akan lebih sedikit melakukan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Komite Audit dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi terhadap minimalisasi kebijakan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
2. Untuk mengetahui peranan Komite Audit dengan pengalaman kerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik terhadap minimalisasi kebijakan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
3. Untuk mengetahui peranan Komite Audit dengan pengalaman kerja di perusahaan pada bidang akuntansi terhadap minimalisasi kebijakan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca mengikuti pembahasan karya akhir ini, maka penulis akan memberikan gambaran mengenai isi karya akhir ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berhubungan dengan karya akhir ini yang meliputi pengertian Komite Audit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan, meliputi rancangan dan metode penelitian, variabel dan pengukurannya, pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari analisis dan pembahasan yang diteliti dengan menggunakan teori-teori yang telah di jelaskan sebelumnya pada Bab II dan metode analisis yang telah dipilih dan ditentukan oleh penulis pada Bab III.

BAB 5 KESIMPULAN

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan mengenai Komite Audit. Batasan masalah, serta saran yang dianggap perlu sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perbankan Indonesia pada khususnya dan pihak lain pada umumnya.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Corporate Governance*

2.1.1. Pengertian *Corporate Governance*

Isu *Corporate Governance* (CG) mulai didengar bersamaan dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat sekitar tahun 1840 (Thager, Alijoyo dan Soembodo, 2003). Sistem korporasi tersebut membicarakan tentang pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), pemisahan antara kepemilikan (*ownership*), para pemegang saham dan pengendalian (*control*) pada perusahaan.

Istilah *Corporate Governance* pertama kali dikemukakan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Istilah tersebut muncul pada Cadbury Report. Cadbury Report mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai “*the system by which organizations are directed and controlled*”. Cadbury Report memandang GCG sebagai perangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Turnbull menyatakan bahwa GCG dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu misalnya hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat, bahkan dalam ilmu agama. Definisi GCG menurut Turnbull adalah :

“Corporate Governance describes all the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services”

Definisi tersebut lebih menekankan perlakuan tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses organisasi dalam rangka menghasilkan dan menjual barang atau jasa. Turnbull

juga berpendapat bahwa penunjukan “*controller dan regulators*” merupakan substansi penting dalam membangun GCG.

Sementara *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) 2004 mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

“Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

OECD (2004) melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan, sehingga dengan melakukan itu semua, maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* intinya mengenai suatu proses, sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang bekepentingan (*stakeholders*) demi tercapainya tujuan organisasi.

2.1.2. Perkembangan *Corporate Governance*

Sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Hal itu, setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama

bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Di antaranya, Sistem Regulatory yang kurang baik, Standar Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak mengherankan jika selama dasawarsa 1990an, tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif datang secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu di antaranya adalah berbagai lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara, termasuk institusi sekafiber World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam GCG seperti *fairness, transparency, accountability, stakeholder concern*. Dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Ujungnya adalah daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

Sangat jelas bahwa perhatian terhadap *Corporate Governance* belakangan ini terutama dipicu oleh skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropa, seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Cadbury Report (UK) dan Treadway Report (US) secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*.

Dalam konsep *Corporate Governance* terdapat dua teori utama yang terkait yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain,

stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai ‘*agents*’ bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship* model.

Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency costs*, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcement*.

Agency costs ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk “*bonding expenditure*” yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

2.1.3. Tujuan dan Manfaat GCG

GCG bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk *overstated*,

ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang akan merugikan para pemegang saham, misalnya karena ekspektasi yang berlebihan dalam menilai kinerja perusahaan (Thager et al, 2003)

Beberapa manfaat dari penerapan GCG yang bisa diambil oleh perusahaan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2000):

1. Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan

2.1.4 Prinsip-Prinsip Umum OECD Mengenai *Corporate Governance*

Pada tahun 2004 *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) mengeluarkan prinsip-prinsip mengenai *Corporate Governance* Yang menjadi acuan masyarakat internasional dalam pengembangan *Corporate Governance*, namun OECD menjelaskan tidak satu model pengembangan *Corporate Governance* yang cocok untuk semua negara, masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu contoh adalah perbedaan sistem yang digunakan dalam perusahaan. Beberapa negara menggunakan *one tier system* dimana pengawas perusahaan disebut "*Board*" dan pengurus perusahaan disebut "*Key Executives*". Sementara itu banyak juga negara yang menggunakan *two tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh "*Board of Commisjoner*" dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh "*Directors*". Indonesia menggunakan *two tier system*, sehingga istilah "*Board*" dalam OECD diartikan sebagai "Dewan Komisaris, dan "*Key Executives*" sebagai "Direksi". Secara umum terdapat enam prinsip *Corporate Governance* dalam Prinsip-prinsip OECD (2004) mengenai *Corporate Governance*. Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup, kerangka dasar *Corporate Governance*, hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan *stakeholders*, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan komisaris.

Dengan banyaknya tuntutan pelaksanaan GCG dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip umum dalam menjalankan GCG menjadi lima unsur, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* atau yang disingkat TARIF. Syakhroza (2002) menjelaskannya sebagai berikut:

1. *Transparency* (transparansi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai keadaan perusahaan. Prinsip ini mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), prinsip ini menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Melalui fungsi komite audit untuk menunjang akuntabilitas perusahaan
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip ini memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (keadilan), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan tidak memihak kepentingan yang lain.

2.2. Penerapan GCG di Perbankan

Tuntutan pengelolaan perbankan yang semakin terbuka dan hati-hati (*prudent*) menjadikan perbankan Indonesia berbenah diri untuk menciptakan system pengelolaan dan pengendalian intern yang lebih efektif dalam rangka penerapan GCG. Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Di dalam peraturan tersebut tugas Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern,
- b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku,
- c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,
- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jonathan Charkham telah menyusun panduan bagi Direktur bank dalam penerapan konsep GCG. Panduan tersebut menyatakan bahwa GCG adalah suatu sistem dalam arti seluas-luasnya dimana suatu bank, dengan segenap sumber daya modalnya, dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai tujuannya. Pokok-pokok panduan tersebut antar lain :

1. Bentuk hukum organisasi bank

Bentuk hukum organisasi bank biasanya diatur oleh suatu perundang-undangan, pada prinsipnya bentuk hukum yang memungkinkan pemisahan fungsi di antar pihak-pihak yang berkepentingan (Pemegang saham, direktur dan manajer) akan semakin meningkatkan penerapan GCG.

2. Susunan *Executive Board*

Pada umumnya susunan *Executive Board* terbagi antar *executive directors* (Dewa Direksi) dan *non executive directors* (Dewan Komisaris). Di dalam susunan *Executive Board* terdapat *Independent directors* (Komisaris

Independent). Untuk menerapkan GCG, susunan *Executive Board* perlu memperhatikan keseimbangan antara *executive directors* (Dewan Direksi) dan *non executive directors* (Dewan Komisaris).

3. Kewenangan *Executive Board*

Pada prinsipnya anggota *Executive Board* secara individu dan kolektif bertanggung jawab dalam mengelola bank secara efektif dan efisien. Untuk itu kewenangan *Executive Board* mencakup *Enterprise, Leadership, Reporting, communicating, Control, Human resources, Financial and other Physical resources, Structuring the company, Establishing audit committee, Set Credit Facilities, Risk management, Compliance, and Social Responsibility*.

4. Pembentukan Komite Pendukung *Executive Board*

Executive Board dapat membentuk komite untuk membantu memastikan bahwa perusahaan telah dikelola secara baik. Komite yang dapat dibentuk antara lain Komite Eksekutif, Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Khusus Lainnya.

5. Lain-lain

Executive Board perlu melakukan tindakan dalam rangka penerapan GCG melalui :

- a. Pembentukan komite risiko operasional secara terpisah.
- b. Pengambilan langkah-langkah atau kebijakan untuk mencegah, menemukan, menindaklanjuti dan melaporkan adanya *fraud*.
- c. Pengambilan langkah-langkah atau kebijakan untuk mencegah, menemukan, menindaklanjuti dan melaporkan adanya *money laundering*.

2.3. Komite Audit

2.3.1. Pengertian Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan

perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Bantuan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dan tugas penting lainnya yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan (Baridwan, 2002).

2.3.2 Peran Komite Audit.

Kasus penipuan dan kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan oleh manajemen telah mendorong profesi akuntansi, pemakai laporan keuangan dan pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya peran komite audit dalam usaha peningkatan kualitas laporan keuangan. Melalui Keputusan Ketua BAPEPAM nomor kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 beserta lampirannya (Peraturan Nomor IX.I.5) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menegaskan kembali tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Audit diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Hasil penelitian mengenai hubungan antara komite audit dengan kehandalan informasi keuangan masih beragam. McMullen (1996) membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang handal lebih mungkin memiliki komite audit. Penelitian Westphal dan Zajac (1997), menyimpulkan bahwa independensi Komite Audit mempunyai hubungan positif dengan level rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen. Carcello dan Neal (2000), menyimpulkan adanya hubungan positif antara Komite Audit dengan berkurangnya tekanan manajemen terhadap Komite Audit pada saat menyusun laporan keuangan. Dezoort dan Salterio (2001), menyimpulkan bahwa Komite Audit mempunyai pengaruh positif terhadap rekayasa yang dilakukan manajemen.

2.3.3 Keanggotaan Komite Audit

Keputusan Ketua BAPEPAM nomor kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 beserta lampirannya (Peraturan Nomor IX.I.5) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juga merinci keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atau non audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6. Bukan merupakan karyawan kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
7. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan
10. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau perusahaan Publik lain pada periode yang sama.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa hubungan positif antara kualitas *Corporate Governance* dengan kehandalan laporan keuangan. Perusahaan tanpa komite audit lebih mungkin terdapat kecurangan laporan keuangan (Dechow et al., 1996 dan McMullen, 1996). Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen

melaporkan laba dengan kandungan *discretionary accruals* yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Price Waterhouse (1980) dalam McMullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Banyak peneliti yang meneliti tentang keanggotaan Komite Audit seperti, Mc Mullen dan Randghun (1996), yang menyimpulkan adanya hubungan yang positif antara kompetensi Komite Audit dengan kemungkinan menurunnya *earning management*. Xie et.al. (2003) menemukan bahwa independensi, latar belakang pengetahuan perusahaan dan keuangan, serta frekuensi pertemuan komite audit memiliki hubungan negatif dengan kemungkinan adanya *earnings management* di perusahaan. Anderson et.al. (2003) juga menemukan bahwa independensi, jumlah atau *size* dan frekuensi pertemuan dari komite audit berpengaruh pada kehandalan laporan keuangan.

Davidson, Xie, dan Xu (2004) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menguji efektifitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Sedangkan Carcello et al. (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa keahlian komite audit independen di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba.

Dhaliwal et al (2007), menemukan Komite Audit dengan keahlian akuntansi berhubungan positif dengan kualitas *accrual*. Dengan keahlian di bidang akuntansi membuat mereka lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab sebagai Komite Audit untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.4 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

2.4.1 Pengertian Aktiva Produktif

Sebagai lembaga pemberi jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah, *Loanable funds* dari bank terbesar diberikan dalam bentuk fasilitas kredit. Akan tetapi, sebagian dana itu disisihkan dalam bentuk penanaman lain, yaitu surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan modal bank pada lembaga keuangan yang bukan bentuk bank atau perusahaan lain.

Aktiva produktif atau *productive assets* sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank tersebut diatas adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Pengelolaan aktiva produktif adalah bagian dari *assets management* yang juga mengatur tentang *cash reserve (liquidity assets)* dan *fixed assets* (aktiva tetap dan inventaris). Ada empat macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan (*earning assets*), yaitu :

- a. Kredit yang diberikan
- b. Surat-surat berharga
- c. Penempatan dana pada bank lain
- d. Penyertaan

Keempat jenis aktiva di atas kesemuanya menggunakan *loanable funds* atau *excess reserve* sehingga dengan memperhatikan bahwa sumber dana terbesar untuk penempatan aktiva itu adalah berasal dari dana pihak ketiga dan pinjaman, maka resiko yang mungkin timbul atas penempatan atau alokasi dan tersebut harus diikuti dan diamati terus melalui analisis-analisis risiko. Semua dalam usaha menanamkan dana tersebut mengundang risiko dimana tidak terbayar kembali atas kredit yang telah diberikan. Sementara itu penanaman dalam bentuk kredit merupakan bagian terbesar dari aktiva operasional dan aktiva secara keseluruhan. Karena itu pengamatan dan analisis tentang bagaimana kualitas dari aktiva produktif harus dilakukan terus menerus.

Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dihantui kredit bermasalah akan mundur. Namun dengan adanya cadangan (PPAP) dan kuatnya permodalan serta perbaikan kualitas manajemen risiko kredit bank, diperkirakan ekspansi kredit akan tetap terkendali sehingga tidak membahayakan stabilitas perbankan.

2.4.2 Pengertian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Penyisihan Penghapusan aktiva produktif yang untuk selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitasnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan, dan dinilai dari :

- a. prospek usaha;
- b. kinerja (*performance*) debitur; dan
- c. kemampuan membayar

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum ditetapkan 5 (lima) golongan pencadangan umum dan khusus yang berdasarkan kolektibilitas kredit, yaitu : Lancar (*pass*), Perhatian Khusus (*Special Mention*), Kurang Lancar (*Sub Standard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*), dengan kriteria sebagai berikut :

1. Cadangan umum ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar dan dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk SBI dan SUN serta bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
3. Cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
4. Cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
5. Cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

2.4.3 PPAP dan Manajemen Laba

Penelitian yang dilakukan oleh (Beatty, Chamberlain dan Magliolo, 1995; Beatty, Ke dan Petroni, 2002; Ahmed et al. 1999) menemukan bahwa bank komersial menggunakan PPAP untuk mengelola pendapatan mereka.

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa manajer bank melakukan pertimbangan dalam menentukan nilai PPAP, karena nilai PPAP sangat mempunyai hubungan yang signifikan dengan pendapatan bank (Ahmed et al 1999). Banyak argumen bahwa bank melakukan kebijakan dalam nilai PPAP untuk memberi tanda bahwa pendapatan mereka akan meningkat pada tahun berikutnya. Beberapa peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa manajemen melakukan pilihan akuntansi diskresionari dan akrual untuk kepentingan manajemen (Watts dan Zimmerman, 1986; Subramanyam, 1996; DeFond dan Park, 1997; Nelson, Elliott, dan Tarpley, 2002). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Ayres (1994) juga mengungkapkan tentang praktik-praktik yang dapat dilakukan oleh manajer untuk mengelola *earnings* atau keuntungan demi menunjukkan prestasinya. Menurut Ayres, ada tiga faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktek-praktek tersebut, yaitu manajemen akrual (*accruals management*), penerapan suatu perubahan akuntansi yang wajib (*adoption of mandatory accounting changes*), dan perubahan akuntansi yang tidak diwajibkan/mengikat (*voluntary accounting changes*). Di lain pihak (Beatty et al. 1995; Collins et al.1995) menyatakan bahwa PPAP akan lebih tinggi ketika pendapatan tinggi, diasumsikan manajer sangat intensif dalam melakukan manajemen laba.

Walaupun banyak penelitian sebelumnya yang menguji intensif manajemen untuk melakukan pertimbangan meningkatkan nilai PPAP, hal ini tidak berarti manajer bank tidak menggunakan kebijakan mengurangi nilai PPAP untuk mencapai pendapatan yang sudah ditargetkan sebelumnya. Banyak argumen menyatakan bahwa manajemen meningkatkan nilai PPAP ketika laba tinggi dan sebaliknya bila laba rendah maka manajemen menurunkan nilai PPAP.

2.4.4 Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba

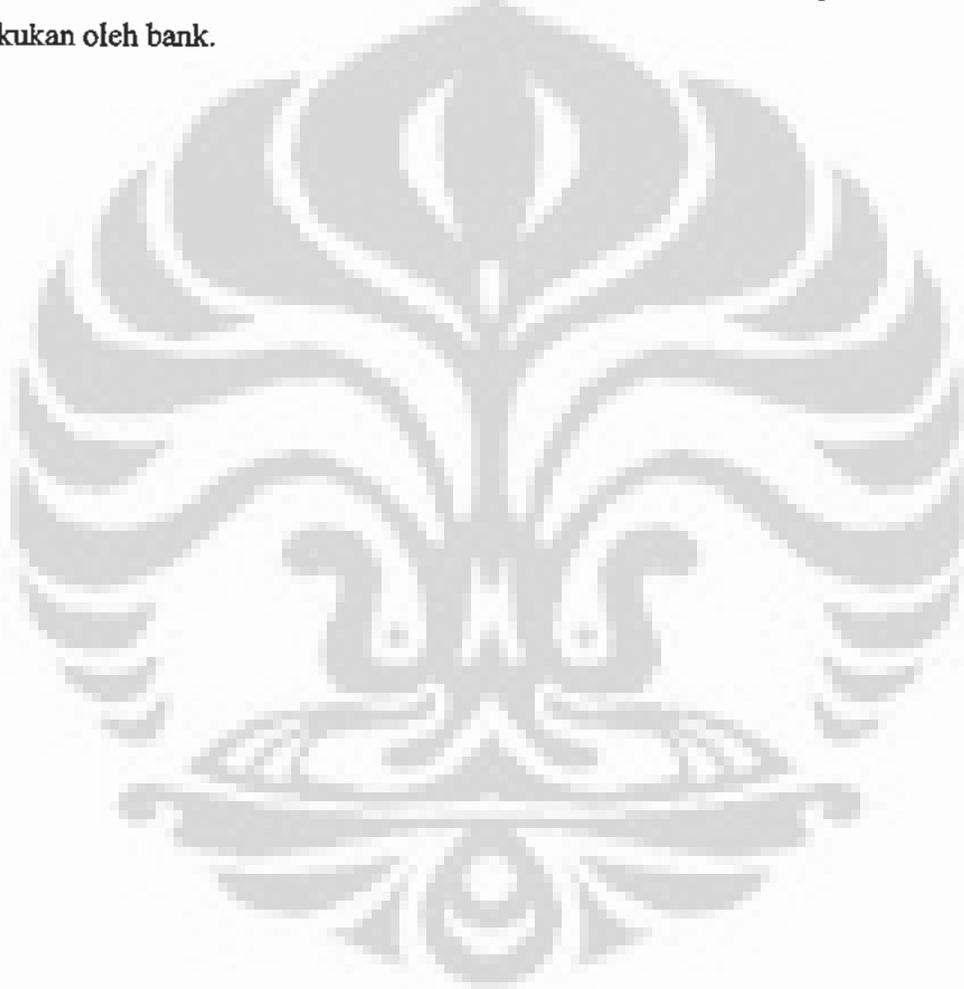
Untuk melakukan pengujian manajemen laba maka perlu dilakukan pengujian juga terhadap ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap manajemen laba. Perusahaan yang sudah besar dan terdaftar di BEI biasanya lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melaporkan pelaporan keuangannya. Peasnell, Pope, dan Young (1998) menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba di Inggris. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil

Penelitian Chtourou, Bedard, dan Couteau (2001) menemukan bahwa ukuran. Perusahaan di Amerika Serikat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada semua kelompok pengujian. Perusahaan yang lebih besar berkesempatan lebih kecil dalam melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil. Dari pengujian Siregar dan Utama (2005) dilaporkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan, makin kecil manajemen labanya.

2.4.5 Kualitas Audit dan Manajemen Laba

Manipulasi *earnings* dapat dikurangi dengan adanya campur tangan auditor, seperti Nelson et al., (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peluang untuk melakukan manipulasi *earnings* semakin kecil karena adanya intervensi auditor. Aturan dan standar profesional juga menegaskan kebutuhan *Corporate Governance* yang efektif dapat mengurangi risiko pelaporan keuangan, termasuk risiko manipulasi *earnings* (Blue Ribbon Committee, 1999). Jika persepsi auditor eksternal tidak mempercayai mekanisme *Corporate Governance* klien untuk membantu mengendalikan kualitas pelaporan keuangan, maka auditor tersebut akan meningkatkan upaya audit (Cohen dan Hanno, 2000). Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Akuntan Publik yang baik dapat mengurangi praktek manajemen laba di perusahaan.

Penelitian sebelumnya menguji hubungan antara kualitas audit dengan kebijakan akrual antara lain, Becker et al. (1998) menemukan perusahaan yang tidak bermitra dengan Kantor Akuntan public “*big five*” melaporkan *discretionary accruals* lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang bermitra dengan Kantor Akuntan Publik “*big five*”. Francis et al (1999) menemukan perusahaan yang bermitra dengan KAP “*big five*” melaporkan *discretionary accruals* yang rendah, konsisten dengan penelitian diatas diharapkan KAP “*big four*” dapat mencegah manajemen laba melalui Penyisihan Penghapusan aktiva produktif yang dilakukan oleh bank.



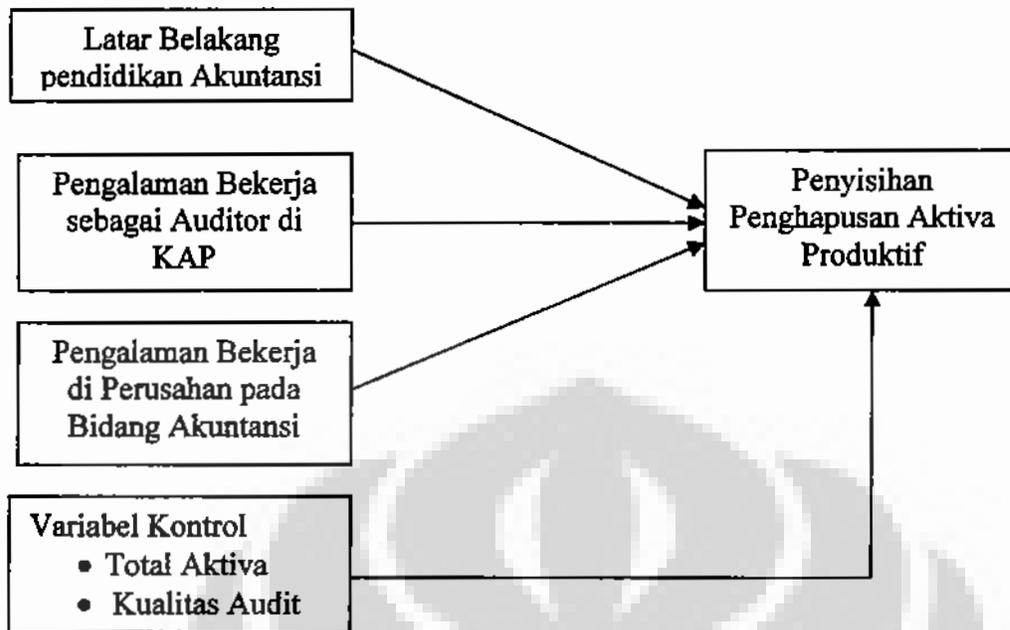
BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Penyisihan Penghapusan aktiva produktif yang untuk selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva. manajemen menggunakan PPAP untuk melakukan manajemen laba, dimana saat laba menurun maka manajemen menurunkan nilai PPAP begitu pula sebaliknya saat laba meningkat maka nilai PPAP akan meningkat. Oleh karena itu diperlukan *Corporate Governance* yang diharapkan dapat mengurangi kemampuan manajemen untuk melakukan manajemen laba atau manipulasi laba.

Praktek *Corporate Governance* tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dari manajemen dalam mengelola perusahaan. Penerapan *Corporate Governance* di perusahaan ditandai dengan keharusan adanya komite audit yang melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Bantuan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dan tugas penting lainnya yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan

Dhaliwal et al (2007), menemukan Komite Audit dengan keahlian akuntansi berhubungan positif dengan kualitas *accrual*. Dengan keahlian di bidang akuntansi diharapkan membuat mereka lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab sebagai Komite Audit untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari manajemen laba.



Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran

3.2 Pengembangan Hipotesis

Zhou dan Chen (2004), menemukan bahwa bank yang memiliki komite audit yang independen dan aktif, dengan jumlah anggota dengan *financial* dan *governance expertise* yang lebih banyak akan mencegah terjadinya *earnings management* melalui Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dhaliwal et al (2007) membagi *financial expertise* ke dalam tiga kelompok yaitu *accounting*, *finance*, dan *supervisor*. Dimana Komite audit yang terdiri dari anggota dengan *financial expertise* (*accounting*, *finance*, dan *supervisor*) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Lebih luas lagi Dhaliwal et al (2007) menjelaskan anggota Komite Audit yang dianggap ahli di bidang keuangan jika mereka mempunyai pengalaman bekerja di Kantor Akuntan Publik sebagai auditor, direktur keuangan atau pengalaman pekerjaan apapun di bidang akuntansi. Dari teori yang dikemukakan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Bank dengan Komite Audit yang memiliki Latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih sedikit melakukan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

DeFond et al. (2005) yang menemukan bahwa pengalaman bekerja sebagai auditor profesional di Kantor Akuntan Publik dan memiliki Sertifikat Akuntan Publik akan meningkatkan efektivitas komite audit. Diharapkan Komite Audit yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor dan Bersertifikat Akuntan Publik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah praktik manajemen laba di perbankan

H₂ : Bank dengan Komite Audit yang memiliki Pengalaman bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik akan lebih sedikit melakukan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Dengan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang dan pengalaman sebagai komite audit di perusahaan lain membuat mereka lebih mengerti aturan yang berlaku pada industri perbankan, sehingga mereka lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab sebagai Komite Audit untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

H₃ : Bank dengan Komite Audit yang memiliki Pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang Akuntansi akan lebih sedikit melakukan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

3.3 Model Penelitian

Model dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis apakah *expertise* Komite Audit dibidang akuntansi dapat mengurangi praktik manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PPAP = \beta_0 + \beta_1 ACCTG ED + \beta_2 EXPERT KAP + \beta_3 EXPERT ACCTG + \beta_4 SIZE + \beta_5 KAP + \varepsilon$$

Dimana :

<i>PPAP</i>	=	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Kredit/Total kredit
<i>ACCTG ED</i>	=	Proporsi Komite Audit Dengan latar belakang pendidikan Akuntansi
<i>EXPERT KAP</i>	=	Proporsi Komite Audit dengan pengalaman bekerja sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik
<i>EXPERT ACCTG</i>	=	Proporsi Komite Audit dengan pengalaman bekerja di perusahaan pada Bidang Akuntansi, dan pengalaman sebagai anggota Komite Audit.

Variabel kontrol yang digunakan sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

<i>SIZE</i>	=	Logaritma natural Total Aktiva
<i>KAP</i>	=	Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik

3.4 Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah statistik kausalitas (*causation research*). Metode ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Objek penelitian merupakan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006 - 2007. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan tahunan yang diterbitkan oleh bank tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Purposive sampling method*, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan maksud dan klasifikasi tertentu.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukurannya

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah di bentuk dan dilaporkan oleh bank tersebut pada laporan tahunannya.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen ini terdiri dari :

a. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan diukur dari proporsi anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang akuntansi.

b. Pengalaman bekerja di KAP

Pengalaman bekerja di KAP diukur dari proporsi anggota komite audit yang mempunyai pengalaman bekerja sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik.

c. Pengalaman bekerja di bidang akuntansi

Pengalaman bekerja di bidang akuntansi diukur dari proporsi anggota komite audit yang mempunyai pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi.

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan untuk memperkuat variabel lainnya agar tidak bias. Variabel kontrol dari penelitian ini adalah logaritma natural Total Asset dan Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik.

3.6 Definisi Variabel Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Penyisihan Penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva. Variabel ini bersifat kuantitatif yang didapat dari Penyisihan Penghapusan aktiva produktif berupa kredit atau pinjaman dibagi total kredit yang diberikan, Variabel ini dilambangkan dengan **PPAP**.

2. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bidang akuntansi dimana paling tidak satu orang anggota komite audit harus mempunyai latar belakang di bidang akuntansi. Variabel ini bersifat kuantitatif yang didapat dengan cara membagi anggota Komite Audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dengan jumlah anggota Komite Audit, hasil akhirnya akan ditunjukkan dalam ukuran proporsi, Variabel ini dilambangkan dengan **ACCTG ED**.

3. Pengalaman bekerja di KAP

Pengalaman bekerja di Kantor Akuntan Publik diukur dengan cara membagi anggota Komite Audit yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dengan jumlah anggota Komite Audit. Variabel ini bersifat kuantitatif yang hasil akhirnya akan ditunjukkan dalam ukuran proporsi, Variabel ini dilambangkan dengan **EXPERT KAP**.

4. Pengalaman bekerja di bidang akuntansi

Pengalaman bekerja di bidang akuntansi diukur dengan cara membagi anggota Komite Audit yang memiliki pengalaman bekerja di bidang akuntansi termasuk komite audit yang pernah menjadi Komite Audit pada perusahaan lain dengan jumlah anggota Komite Audit. Variabel ini bersifat kuantitatif yang pada hasil akhirnya akan ditunjukkan dalam ukuran proporsi, Variabel ini dilambangkan dengan **EXPERT ACCTG**.

Variabel Kontrol

1. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dari logaritma natural jumlah total aktiva yang dimiliki oleh setiap perusahaan sampel. Total aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Ukuran bank biasanya diwakilkan dengan total aktiva. Variabel ini dilambangkan dengan **SIZE**

2. Kualitas Audit

Kualitas Audit yang diproksikan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan variabel kontrol yang bersifat dummy dengan mengelompokkan perusahaan ke dalam dua kategori, yaitu perusahaan yang bermitra dengan KAP 'Big Four' dan perusahaan yang tidak bermitra dengan KAP 'Big Four'. Perusahaan yang bermitra dengan KAP 'Big Four' diberi kode 1 sedangkan untuk perusahaan yang tidak bermitra dengan KAP 'Big Four' diberi kode 0. Kantor Akuntan Publik yang termasuk 'Big Four' yaitu : (1) Drs.Hadi Sutanto & rekan (Price Waterhouse-Coopers), Prasetio, Sarwoko dan Sanjaya (Ernst & Young), Oesman, Bing, dan Satrio (Deloitte Touche Tohmatsu) dan Sidharta & Harsono (KPMG). Ukuran Kantor Akuntan Publik ini dilambangkan dengan **KAP**.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

1. Unit atau populasi yang dianalisis

Populasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah BANK yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan sampel dimulai dari tahun 2006-2007 dan telah mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama periode pengamatan sampel.

2. Pemilihan sampel dan jumlah sampel

Pemilihan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Sampel penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk *annual report* yang mencakup tentang pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Laporan Komite Audit, Total Asset dan Kantor Akuntan Publik. Semua kebutuhan sumber data tersebut diperoleh dari laporan tahunan yang sudah di *publish* di web BEI dan bisa di unduh di www.idx.co.id.

Dengan berdasarkan kriteria tersebut serta adanya keterbatasan dalam kelengkapan data yang tersedia maka sampel yang diperoleh sebanyak 54 sampel perusahaan. Hasil dari seleksi sampel setelah melalui kriteria yang ditentukan diuraikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel

Kriteria Seleksi Sampel	Jumlah
Jumlah sampel awal	54
Dikeluarkan dari sampel karena :	
1. Bank yang tidak Melaporkan Laporan Tahunan 2006	(8)
2. Bank yang tidak Melaporkan Laporan Tahunan 2007	(4)
Jumlah sampel akhir yang digunakan	42

3.8 Metode Analisis Data

a. Statistik deskriptif

Analisis ini berguna sebagai alat untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan sampel yang telah ada tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis ini menghitung nilai Mean dan Standar Deviasi.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Analisa Kolmogorov-Smirnov merupakan suatu pengujian normalitas secara *univariate* untuk menguji keselarasan data masing-masing variabel penelitian.

Perumusan hipotesa untuk uji normalitas adalah sebagai berikut :

H_0 : data berasal dari populasi normal.

H_a : data berasal dari populasi tidak normal.

Pengambilan keputusan :

Jika sig. < 0,05, maka H_0 ditolak.

Jika sig. > 0,05, maka H_0 diterima.

Selain menggunakan Kolmogorov-Smirnov uji normalitas dalam penelitian ini juga menggunakan P-Plot Test. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal. Dasar pengambilan keputusannya

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui hubungan yang bermakna korelasi (langsung) antara setiap variabel independen dalam suatu regresi. Konsekuensi dari Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi nilainya kecil, standar *error* regresi nilainya besar sehingga pengujian individunya menjadi tidak signifikan. Uji ini dapat ditunjukkan dengan menentukan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Hipotesa multikolinearitas :

H_0 : Tidak ada Multikolinearitas

H_a : Ada Multikolinearitas

Keputusan :

Jika *Variance Inflation Factor* > 10 maka H_0 ditolak, ada multikolinieritas

Jika *Variance Inflation Factor* < 10 maka H_0 diterima tidak ada multikolinieritas

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana masing-masing *disturbance error* mempunyai variansi yang tidak sama. Hal ini disebabkan karena *error learning* model, perbaikan dalam pengumpulan data, kesalahan spesifikasi model. Dengan kata lain heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari *error* bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari *error* harus bersifat homogen. Uji ini menggunakan uji Glejser dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan mengandung variansi residual yang bersifat heteroskedastisitas.

Hipotesa heteroskedastisitas:

H_0 : tidak ada heteroskedastisitas

H_a : ada heteroskedastisitas

Keputusan :

Jika signifikan < 0.05 , maka H_0 ditolak (ada heteroskedastisitas)

Jika signifikan > 0.05 , maka H_a diterima (tidak ada heteroskedastisitas)

e. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara *error* dengan *error* periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson.

Hipotesa autokorelasi:

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_a : ada autokorelasi

Keputusan :

Tabel 3.2 Kriteria Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada Autokorelasi Positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada Autokorelasi Positif	Tidak ada keputusan	$D_l < d < d_u$
Ada Autokorelasi Negatif	Tolak	$4-d_l < d < 4$
Tidak ada Autokorelasi Negatif	Tidak ada keputusan	$4-d_u < d < d-d_l$
Tidak ada Autokorelasi	Jangan tolak	$d_u < d < 4-d_u$

f. Uji Goodness of Fit ($Adj. R^2$)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

g. Uji Statistik F

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan dari variabel-variabel dependen yang bertujuan apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (uji F).

Adapun langkah-langkah pengujian F adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a = Ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Menentukan keputusan

Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- i. Jika signifikansi F statistik $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- ii. Jika signifikansi F statistik $> 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti semua variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

h. Uji t (Uji individu)

Uji t (Uji individu) adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun langkah-langkah pengujian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis

H_0 = Tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a = Ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Menentukan keputusan

Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- i. Jika p-value $> 0,05$ dan t-hitung $< t$ -tabel

Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti variabel-variabel yang diuji tidak berpengaruh pada PPAP

- ii. Jika p-value $< 0,05$ dan t-hitung $> t$ -tabel

Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel-variabel yang diuji berpengaruh terhadap PPAP

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 42 sampel. Sampel tersebut terdiri dari 21 bank yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama dua tahun yang dimulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.

Analisis statistik deskriptif seperti pada tabel 4.1 menunjukkan nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel. Nilai Minimum merupakan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum merupakan nilai tertinggi untuk setiap variabel dalam penelitian. Nilai Mean merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian yang mencerminkan data tersebut heterogen atau homogen yang sifatnya fluktuatif.

Tabel 4.1.
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviasi
PPAP	42	0,0090	0,1220	0,0322	0,02375
ACCTGED	42	0	1	0,3829	0,23207
EXPERTKAP	42	0	0,6670	0,1758	0,19390
EXPERTACCTG	42	0	1	0,3742	0,26928
SIZE (LnTA)	42	27,6031	33,3965	30,6191	1,69387
KAP (dummy)	42	0	1	0,6667	0,47712

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat enam variabel penelitian (PPAP, ACCTGED, EXPERTKAP, EXPERTACCTG, SIZE dan KAP)

dengan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 42 sampel. Beberapa penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik diuraikan sebagai berikut.

1. PPAP

Dari hasil pengujian statistik deskriptif, rata-rata PPAP bank di Indonesia pada tahun yang diamati adalah 0,3829 dari total kredit yang dikeluarkan. Dimana PPAP minimum 0,0090 dan maksimum sebesar 0,1220. Dengan rata-rata PPAP sebesar 0,0322 maka dapat dikatakan bank yang memiliki PPAP dibawah 0,0322 terlalu optimistik dalam tingkat Kolektibilitas kreditnya.

2. ACCTGED

Rata-rata proporsi untuk ACCTGED pada bank di Indonesia adalah 0,3829. Dimana yang terendah berproporsi 0 yang berarti tidak seorang pun dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan yang tertinggi berproporsi 1 yang berarti semua anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

3. EXPERTKAP

Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi EXPERTKAP anggota Komite Audit pada bank di Indonesia sebesar 0,1758. Dimana yang terendah bernilai 0 yang berarti tidak seorangpun anggota komite audit yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dan yang tertinggi bernilai 0,6670 yang berarti 0,6670 dari seluruh anggota Komite Audit memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik.

4. EXPERTACCTG

Rata-rata proporsi untuk EXPERTACCTG pada bank di Indonesia adalah 0,3742. Dimana yang terendah berproporsi 0 yang berarti tidak seorangpun anggota komite audit yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi dan tertinggi bernilai 1 yang berarti semua anggota komite audit memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi.

5. SIZE

Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata ukuran perusahaan yang diprosikan melalui total asset. Total asset yang terendah

sebesar Rp. 972.475.600.991 dan tertinggi sebesar Rp. 319.085.590.000.000. Dengan rata-rata total aset sebesar Rp. 58.947.306.130.961 maka dapat dikatakan bank yang memiliki total aset dibawah Rp. 58.947.306.130.961 adalah bank kecil yang dimiliki swasta dan bank yang memiliki total aset diatas Rp. 58.947.306.130.961 adalah bank besar yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

6. KAP

Kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik memiliki rata-rata 0,6667 dimana yang terendah bernilai 0 yang berarti bank tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "*Non Bigfour*" dan tertinggi bernilai 1 yang yang berarti bank tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "*Bigfour*"

4.2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Analisa *Kolmogorov-Smirnov* merupakan suatu pengujian normalitas secara *univariate* untuk menguji keselarasan data masing-masing variabel penelitian, dimana suatu sampel dikatakan berdistribusi normal atau tidak.

Perumusan hipotesa untuk uji normalitas adalah sebagai berikut :

H_0 : data berasal dari populasi normal.

H_a : data berasal dari populasi tidak normal.

Kriteria keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut :

Jika $sig. < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Jika $sig. > 0,05$, maka H_0 diterima.

Tabel 4.2.
Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	Sig.	Keputusan H_0	Kesimpulan
PPAP	0,077	H_0 diterima	data berdistribusi normal
ACCTGED	0,130	H_0 diterima	data berdistribusi normal
EXPERTKAP	0,001	H_0 ditolak	data berdistribusi tidak normal
EXPERTACCTG	0,026	H_0 ditolak	data berdistribusi tidak normal
SIZE ($\ln TA$)	0,666	H_0 diterima	data berdistribusi normal

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*, diketahui bahwa secara *univariate* terdapat 2 variabel yaitu EXPERTKAP dan EXPERTACCTG yang mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti kedua variabel dinyatakan berdistribusi tidak normal.

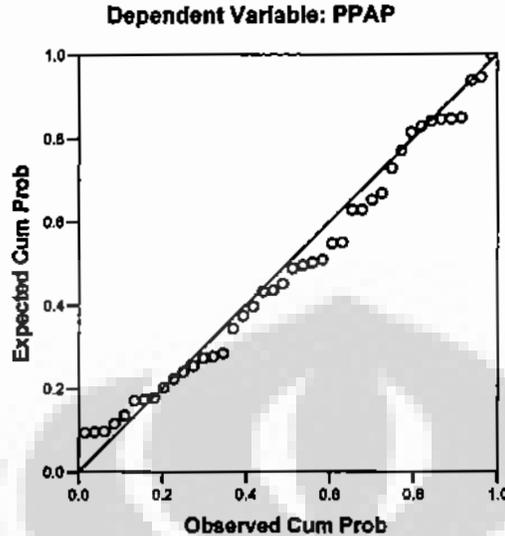
Sementara itu untuk variabel lainnya yaitu PPAP, ACCTGED dan SIZE mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka H_0 diterima, sehingga variabel-variabel tersebut dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas menurut Ghazali (2005), bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan analisis Grafik *Normal P-P Plot* dimana normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil pengujian normalitas dinyatakan pada gambar berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1.
Normal P-P Plot

Berdasarkan Grafik *Normal P-P Plot* diatas, memperlihatkan bahwa penyebaran data yang ditunjukkan oleh penyebaran gambar titik-titik, cenderung mendekati dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variabel independen mempunyai hubungan langsung (korelasi) yang sangat kuat. Multikolinearitas terjadi jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai *Tolerance* lebih kecil 0,10 (Hair et. al. 1998).

Perumusan hipotesa untuk uji multikolinearitas adalah sbb :

H_0 : tidak ada multikolinearitas

H_a : ada multikolinearitas

Kriteria keputusan uji multikolinearitas adalah sbb:

Jika $VIF > 10$ atau $Tolerance < 0,1$ maka H_0 ditolak, ada multikolinearitas

Jika $VIF < 10$ atau $Tolerance > 0,1$ maka H_0 diterima, tidak ada multikolinearitas.

Dari hasil pengolahan data statistik diperoleh tabel pengujian multikolinearitas sbb :

Tabel 4.3.
Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Toleranc e	VIF	Keputusan H_0	Kesimpulan
ACCTGED	0,468	2,137	H_0 ditolak	tidak ada multikolinearitas
EXPERTKAP	0,609	1,643	H_0 ditolak	tidak ada multikolinearitas
EXPERTACCTG	0,342	2,921	H_0 ditolak	tidak ada multikolinearitas
SIZE (LnTA)	0,766	1,306	H_0 ditolak	tidak ada multikolinearitas
KAP	0,674	1,483	H_0 ditolak	tidak ada multikolinearitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas, diketahui seluruh variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari batas maksimal 10 atau nilai Tolerance lebih dari 0,1. Sehingga H_0 ditolak, yang artinya variabel independen tersebut tidak menunjukkan adanya gejala *colinearitas* (tidak ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel independen lainnya). Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran asumsi multikolinearitas pada model persamaan regresi.

4.3.2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara *error* dengan *error* periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson berkisar diantara nilai batas atas (d_U) maka diperkirakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi.

Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4.
Keputusan Autokorelasi

Hipotesa Nol (H_0)	Keputusan	Kriteria
Tidak ada autokorelasi positif	H_0 ditolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	tidak ada keputusan	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	H_0 ditolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	tidak ada keputusan	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi (positif atau negatif)	H_0 diterima	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber : *Basic Econometrics, Gujarati, (2003)*

Berikut ini adalah tabel hasil pengujian autokorelasi :

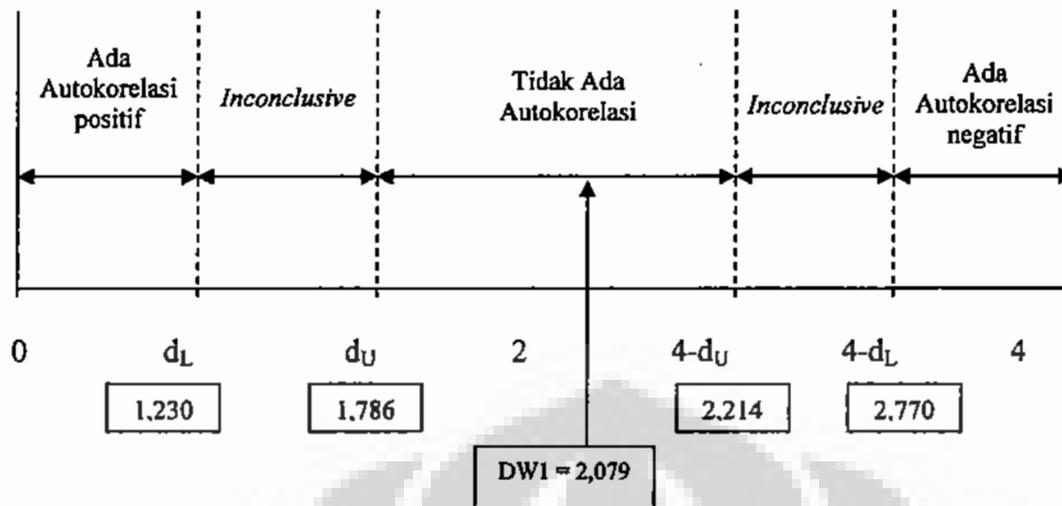
Tabel 4.5.
Hasil Pengujian Autokorelasi

N	K'	α	d_L	d_U	$4 - d_U$	$4 - d_L$	DW	Kesimpulan
42	5	5%	1,230	1,786	2,214	2,770	2,079	tidak ada autokorelasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa : nilai Durbin Watson pada persamaan regresi model 1 yaitu 2,079 berada pada daerah $d_U < d < 4 - d_U$, maka H_0 diterima. Dengan demikian tidak ada autokorelasi pada model persamaan regresi, sehingga asumsi autokorelasi telah terpenuhi.

Pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan *Durbin-Watson test* dapat dinyatakan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 4.2
Pengujian Autokorelasi

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap *error* bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari *error* harus bersifat homogen. Pengujian dilakukan dengan uji *Glejser*.

Hipotesa uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak ada Heteroskedastisitas

H_a : ada Heteroskedastisitas

Kriteria keputusan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Jika $\text{sig.} > 0,05$, H_0 diterima, *variens error homogen* (tidak ada heteroskedastisitas)

Jika $\text{sig.} < 0,05$, H_0 ditolak, *variens error heterogen* (ada heteroskedastisitas)

Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	H ₀	Keputusan
ACCTGED	0,197	H ₀ diterima	varians <i>error</i> homogen
EXPERTKAP	0,492	H ₀ diterima	varians <i>error</i> homogen
EXPERTACCTG	0,082	H ₀ diterima	varians <i>error</i> homogen
SIZE (LnTA)	0,296	H ₀ diterima	varians <i>error</i> homogen
KAP	0,760	H ₀ diterima	varians <i>error</i> homogen

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada model persamaan regresi, nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Maka H₀ diterima, sehingga *varians error* dinyatakan homogen. Dengan demikian disimpulkan tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

4.4. Analisa Regresi

Pengujian regresi berganda meliputi uji simultan (uji F), goodness of-fit model (*Adj. R²*) dan uji partial (uji t).

Tabel 4.7.

Hasil Pengujian Regresi

$$PPAP = \alpha + \beta_1 ACCTGED + \beta_2 EXPERTKAP + \beta_3 EXPERTACCTG + \beta_4 SIZE + \beta_5 KAP + \epsilon$$

	Uji t			Adj R ²	Uji F	
	B	t-hitung	Sig. α 5%		F-hitung	Sig.
(Constant)	-0,179	-3,115	0,004	0,398	6,422	0,000
ACCTGED	-0,063	-3,504	0,001			
EXPERTKAP	0,013	0,690	0,494			
EXPERTACCTG	0,023	1,274	0,211			
SIZE	0,007	3,726	0,001			
KAP	0,005	0,692	0,493			

Sumber : Hasil Pengolahan Data

4.4.1. Pengujian Simultan (uji F)

Pengujian secara simultan menghasilkan perbandingan nilai sig. $0,000 < \alpha 0,05$ maka H_a diterima. Artinya secara simultan bank dengan komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (ACCTGED), pengalaman bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik (EXPERTKAP) dan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi (EXPERTACCTG) akan lebih sedikit melakukan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan demikian model penelitian yang digunakan sudah cukup baik dalam menggambarkan variabel yang mempengaruhi manajemen laba.

4.4.2. Goodness of-Fit Model (*Adj. R²*)

Pada tabel diatas diketahui koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adj. R²* adalah 0,398. Artinya seluruh variabel independen yaitu latar belakang pendidikan akuntansi (ACCTGED), pengalaman bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik (EXPERTKAP) dan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi (EXPERTACCTG) mampu menjelaskan variasi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar 39,8%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

4.4.3. Uji t ACCTG ED

Pengujian regresi untuk hipotesa 1 menunjukkan *p-value* $0,001 < \alpha 0,05$ maka H_{a1} diterima. Artinya komite audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi (ACCTGED) berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan kata lain, bank dengan komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih sedikit melakukan manajemen laba melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Nilai koefisien regresi sebesar -0,063 menunjukkan pengaruh antara ACCTGED terhadap PPAP adalah negatif. Artinya, jika bank dengan komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi meningkat sebesar 1 satuan (seluruh komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi) maka Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif akan mengalami penurunan sebesar 0,063 (6,3%).

Hasil ini konsisten dengan penelitian Dhaliwal et al (2007), menemukan Komite Audit dengan keahlian akuntansi berhubungan positif dengan kualitas *accrual*. Dengan keahlian di bidang akuntansi membuat mereka lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab sebagai Komite Audit untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini menunjukkan bahwa komite audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi telah efektif dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena dengan makin banyak anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi maka proses pengawasan yang dilakukan komite ini menghasilkan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

4.4.4. Uji t EXPERT KAP

Pengujian regresi untuk hipotesa 2 menunjukkan *p-value* 0,494 > alpha 0,05 maka H_{a2} ditolak. Artinya komite audit yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik (EXPERTKAP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Hasil ini di luar harapan karena dengan pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik diharapkan Komite Audit mengetahui standar dan aturan yang berlaku mengenai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan dapat menerapkannya dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, sehingga akan mencegah terjadinya manajemen laba yang dilakukan manajemen dan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan pengalamannya menjadi auditor akan menciptakan rasa skeptisme atau rasa tidak percaya kepada manajemen sehingga berusaha mencari kesalahan yang dibuat manajemen, kinerja Komite Audit diukur dari banyaknya kesalahan yang ditemukannya.

Hasil ini berlawanan dengan penelitian DeFond et al. (2005) yang menemukan bahwa pengalaman bekerja sebagai auditor profesional di Kantor Akuntan Publik dan memiliki Sertifikat Akuntan Publik akan meningkatkan efektivitas komite audit.

4.4.5. Uji t EXPERT ACCTG

Hasil pengujian regresi untuk hipotesa 3 menunjukkan p -value 0,211 > alpha 0,05 maka H_{a3} ditolak. Artinya komite audit yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang Akuntansi (EXPERTACCTG) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Hasil ini sejalan dengan penelitian Carcello et al. (2006) yang gagal menemukan hubungan antara komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dengan kualitas laporan keuangan.

Hasil ini diluar harapan karena Komite Audit dengan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang Akuntansi membuat mereka lebih efektif melakukan pengawasan sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik. Dengan pengalaman bekerja di bidang akuntansi diharapkan Komite Audit mengetahui standar akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat mencegah praktek manajemen laba.

Hasil ini berlawanan dengan penelitian Dhaliwal et al (2007), menemukan Komite Audit dengan keahlian akuntansi berhubungan positif dengan kualitas *accrual*. Dengan keahlian di bidang akuntansi membuat mereka lebih efektif dalam melakukan tanggung jawab sebagai Komite Audit untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

4.4.6. Uji t Variabel Kontrol SIZE dan KAP

Hasil pengujian regresi untuk variabel control SIZE menunjukkan p -value 0,001 < alpha 0,05 Artinya ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan kata lain, semakin besar total aset bank semakin besar pula pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

(PPAP). Nilai koefisien regresi sebesar 0,007 menunjukkan pengaruh antara SIZE terhadap PPAP adalah positif, sehingga semakin besar asetnya maka manajemen semakin sulit melakukan manajemen laba. Hal ini terjadi karena pada bank yang memiliki total aset yang besar para analis keuangan akan semakin menganalisis laporan keuangan bank tersebut. Sehingga manajemen akan menghindari praktek manajemen laba didalam perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Peasnell, Pope, dan Young (1998), Chtourou, Bedard, dan Couteau (2001), Midiastuty dan Machfoedz (2003), dan Siregar dan Utama (2005), hasil penelitian mereka menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil pengujian regresi untuk variabel kontrol KAP menunjukkan *p-value* 0,493 > alpha 0,05 Artinya Kualitas Audit yang di proksikan oleh Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dengan kata lain kualitas audit oleh Kantor Akuntan Publik “*bigFour*” dan “*non bigfour*” tidak mempengaruhi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Hasil ini konsisten dengan penelitian Siregar dan Utama (2008) yang menemukan tidak ada perbedaan pengungkapan laporan keuangan antara perusahaan yang diaudit Kantor Akuntan publik “*big four*” dan “*non big four*”. Hal ini menggambarkan tidak adanya perbedaan kualitas audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik “*big four*” dan “*non big four*” karena mereka menggunakan standar audit dan peraturan yang sama, sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang sama.

Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Becker et al. (1998) yang menemukan perusahaan yang tidak bermitra dengan Kantor Akuntan public “*big five*” melaporkan *discretionary accruals* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang bermitra dengan Kantor Akuntan Publik “*big five*”. Francis et al (1999) menemukan perusahaan yang menyewa KAP “*big five*” melaporkan *discretionary accruals* yang rendah

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Komite Audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan Komite Audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi akan mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.
- Komite Audit yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dengan pengalaman bekerja sebagai auditor Komite Audit tidak dapat mencegah terjadinya praktik manajemen laba.
- Komite audit yang memiliki pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang Akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi tidak mencegah manajemen untuk melakukan manajemen laba.
- Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Semakin besar total asetnya semakin sulit melakukan praktik manajemen laba karena para analis akan lebih menganalisis laporan keuangannya.
- Kualitas Audit yang diprosikan oleh ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Kualitas audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik “*big four*” dan “*non big four*” tidak berbeda karena

bank merupakan industri yang sangat diatur oleh pemerintah, sehingga standar dan aturan yang digunakan dalam mengaudit relatif sama.

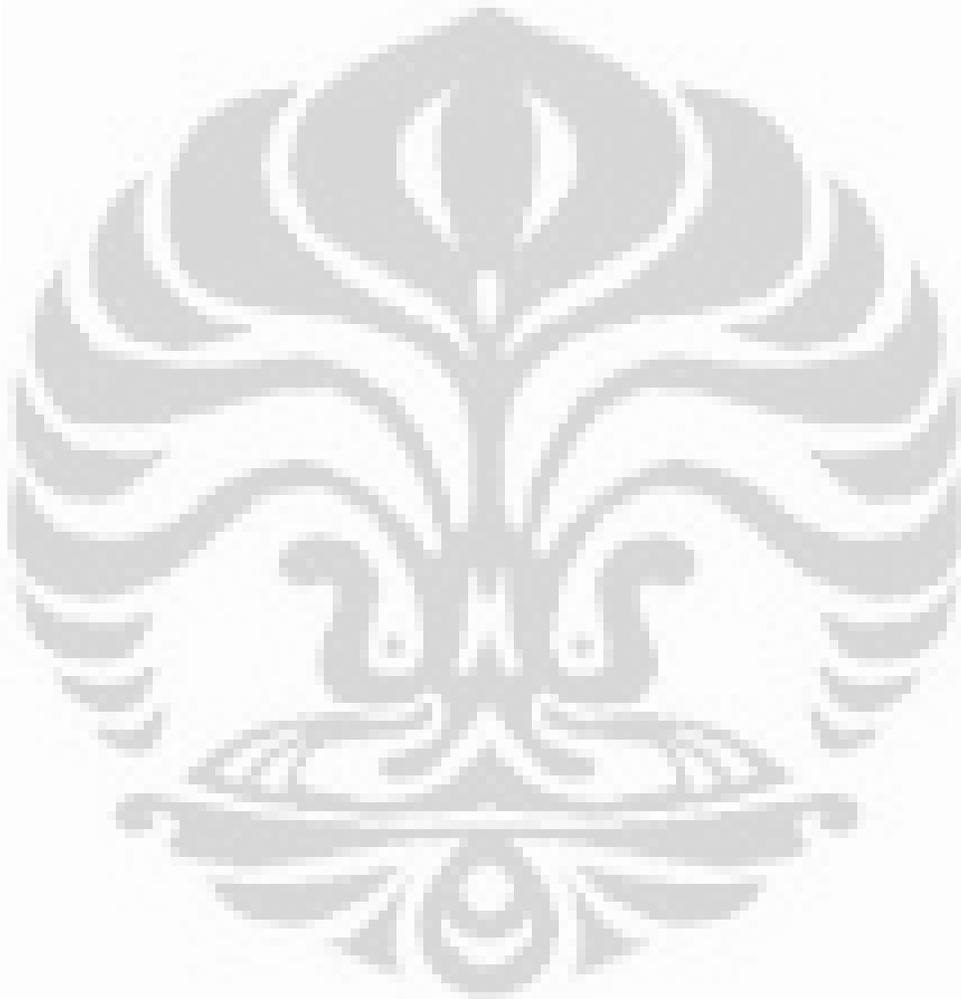
5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu variabel *Corporate Governance* diwakili oleh latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi. Ketiga variabel ini kurang dapat mengukur secara komprehensif praktik *Corporate Governance* dalam perbankan, sehingga perlu adanya variabel lain yang mencerminkan praktik *Corporate Governance* secara lebih tepat, sebaiknya penelitian selanjutnya mempertimbangkan umur anggota Komite Audit sebagai proksi pengalaman bekerja, lama bekerja sebagai komite audit di bank tersebut, jumlah rapat Komite Audit setiap tahunnya dan sistem remunerasi untuk Komite Audit.

5.3 Saran

- Sebaiknya BAPEPAM sebagai lembaga pengawasan sebaiknya membuat aturan yang mensyaratkan semua anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi agar kualitas laporan keuangan semakin baik.
- Penelitian selanjutnya menambah periode penelitian menjadi lebih panjang agar efek dari mekanisme *corporate governance* dapat lebih dirasakan dalam mengurangi manajemen laba di perusahaan.
- Penelitian selanjutnya diharapkan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang lebih jelas dan bahkan lebih luas selain faktor-faktor yang telah diujikan sebelumnya.
- Bank Indonesia sebagai bank sentral harus lebih ketat mengawasi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh suatu

bank agar tidak terjadi praktek manajemen laba, sehingga tidak ada nasabah yang dirugikan.



Universitas Indonesia

Daftar Pustaka

- Abbott, L.J., S. Parker, and G.F. Peters (2004), "Audit Committee Characteristics and Restatements", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol.23, 69-87.
- Ahmed, A., C. Takeda, and S. Thomas. 1999. *Bank loan loss provisions: a reexamination of capital management, earnings management and signaling effects*. *Journal of Accounting and Economics* 28: 1-25.
- Alijoyo, Antonius, Elmar Bouma, TB M Nazmudin Sutawinangun, dan M Doddy Kusadrianto. 2004. *Review of Corporate Governance in Asia: Corporate Governance in Indonesia*. *Forum for Corporate Governance in Indonesia*.
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Kep-29/PM/2004. Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.
- Bank Indonesia, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Baridwan, Anis. "Keberadaan Komite Audit dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Komisaris" Universitas Padjajaran, Bandung , 23 Desember 2003.
- Beatty, A., B. Ke, and K. Petroni. 2002. *Earnings management to avoid earnings declines across public and privately held banks*. *The Accounting Review* 77 (July): 547-570.
- Becker, C., M. DeFond, J. Jiambalvo, and K. R. Subramanyam. 1998. *The effect of audit quality on earnings management*. *Contemporary Accounting Research*, Vol 15, No 1.
- Block, Peter. *Stewardship Theory*.1993. Berrett-Koehler Publisher, San Francisco.
- Blue Ribbon Committee (BRC), 1999, *Report and Recommendations of the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees*. Stamford, CT: BRC.
- Carcello, Joseph V., C.W. Hollingsworthand, and A. Klein, (2006), "Audit Committee Financial Expertise, Competing Governance Mechanisms, and Earnings Management, Working Paper, University of Tennessee.
- Davidson III, Wallace N., Biao Xie, and Weihong Xu. 2004. *Market Reaction to Voluntary Announcements of Audit Committee Appointments: The Effects of Financial Expertise*. *Journal of Accounting and Public Policy Volume* 23 Juli- Agustus: 279-293.

- DeZoort, F.T. and S. Salterio (2001), "The Effects of Corporate Governance Experience and Financial Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Member's Judgements", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, vol. 20, 31-47.
- Dhaliwal, Dan, Vic Naiker, and Farshid Navissi (2007), "Audit Committee Financial Expertise, Corporate Governance and Accruals Quality: An Empirical Analysis", *Working Paper*.
- Francis, J., E. Maydew and H. Sparks. 1999. *The role of Big 6 auditors in the credible reporting of accruals. Auditing: A Journal of Practice and Theory* 18 (Fall): 17-34.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics. Fourth Edition*. New York: MC. Graw-Hill Inc.
- Klien, A. 2002. "Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings management". *Journal Accounting and Economics* (33), 375—400.
- McDaniel, L., Martin, R. D., Maines, L. A., 2002. *Evaluating financial reporting quality: The effects of financial expertise vs. financial literacy. The Accounting Review* 77, 139-167.
- McMullen, D. (1996), "Audit Committee Performance: An Investigation of the Consequences Associated with Audit Committees", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. 87-103.
- McMullen, D. A., Raghunandan, K., 1996. *Enhancing audit committee effectiveness. Journal of Accountancy* 182, 79-81.
- Nachrowi, Djalal nachrowi dan Hardius Usman. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peasnell, KV., PF Pope, and S Young. 1998. *Outside Director, Board Effectiveness, and Earnings Management. Working Papers from Lancaster University*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Steinberg, Richard M, Bromilow, Catherine L. *Audit Committee Effectiveness-What Works Best, Secon Edition*, PriceWaterhouse Coopers, USA, 2000.

Syakhroza, Akhmad. "mekanisme Pengendalian Internal dalam Melakukan Assesment terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance", *Usahawan*, No. 08 Th XXXI (Agustus 2002), 41-52.

Veronica, Sylvia, dan Siddharta Utama. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)*. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 - 16 September 2005

Veronica, Sylvia, and Siddharta Utama. 2005. *Type of Earning Management and The Effect of Ownership Structure, Firm Size, and Corporate-Governance: Evidence from Indomesia*. *Journal of Accounting* 43 (2008) 1-27

Watts, R., and J. Zimmerman (1986), *Positive Accounting Theory*, Prentice Hall.

Xie, Biao, Wallace N. Davidson III, and Peter J. DaDalt (2003), "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and The Audit Committee", *Journal of Corporate Finance*, vol. 9, 295-316.

Zhou, Jian, and Ken Y. Chen (2004), "Audit Committee, Board Characteristics and Earnings Management by Commercial Banks", *Working Paper*.

www.fcgi.or.id

www.bi.go.id

www.idx.co.id

Lampiran

Daftar Perusahaan Sampel

N0	Bank
1	Bank Artha graha International
2	Bank Bukopin
3	Bank Bumi Arha
4	Bank Century
5	Bank Central Asia
6	Bank Danamon
7	Bank Eksekutif
8	Bank Lippo
9	Bank Mandiri
10	Bank Mayapada
11	Bank Mega
12	Bank Negara Indonesia
13	Bank Niaga
14	Bank Nusantara Parahyangan
15	Bank NISP
16	Bank Permata
17	Bank Panin
18	Bank Republik Indonesia
19	Bank Swadesi
20	Bank UOB Buana
21	Bank Victoria

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPAP	42	.0090	.1220	.0322	.02375
ACCTGED	42	.0000	1.0000	.3829	.23207
EXPERTKAP	42	.0000	.6670	.1758	.19390
EXPERTACCTG	42	.0000	1.0000	.3742	.26928
SIZE	42	27.6031	33.3965	30.6191	1.69387
KAP	42	.0000	1.0000	.6667	.47712
Valid N (listwise)	42				

Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PPAP	ACCTGED	EXPERTKAP	EXPERTA CCTG	SIZE
N		42	42	42	42	42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0322	.3829	.1758	.3742	30.6191
	Std. Deviation	.02375	.23207	.19390	.26928	1.69387
Most Extreme Differences	Absolute	.197	.180	.284	.227	.112
	Positive	.197	.180	.284	.227	.098
	Negative	-.185	-.129	-.182	-.108	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z		1.277	1.169	1.904	1.474	.727
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077	.130	.001	.026	.668

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PPAP	.0322	.02375	42
ACCTGED	.3829	.23207	42
EXPERTKAP	.1758	.19390	42
EXPERTACCTG	.3742	.26928	42
SIZE	30.6191	1.69387	42
KAP	.6667	.47712	42

Correlations

		PPAP	ACCTGED	EXPERTKAP	EXPERTA CCTG	SIZE	KAP
Pearson Correlation	PPAP	1.000	-.284	.066	.017	.520	.274
	ACCTGED	-.284	1.000	.429	.727	.185	.330
	EXPERTKAP	.066	.429	1.000	.820	.066	.262
	EXPERTACCTG	.017	.727	.820	1.000	.190	.387
	SIZE	.520	.185	.066	.190	1.000	.478
	KAP	.274	.330	.262	.387	.478	1.000
Sig. (1-tailed)	PPAP	.	.045	.339	.458	.000	.039
	ACCTGED	.045	.	.002	.000	.148	.016
	EXPERTKAP	.339	.002	.	.000	.338	.047
	EXPERTACCTG	.458	.000	.000	.	.114	.008
	SIZE	.000	.148	.338	.114	.	.001
	KAP	.039	.016	.047	.008	.001	.
N	PPAP	42	42	42	42	42	42
	ACCTGED	42	42	42	42	42	42
	EXPERTKAP	42	42	42	42	42	42
	EXPERTACCTG	42	42	42	42	42	42
	SIZE	42	42	42	42	42	42
	KAP	42	42	42	42	42	42

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KAP, EXPERTK AP, SIZE, ACCTGED, EXPERTA CCTG		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PPAP

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.687 ^a	.471	.398	.01842	2.079

a. Predictors: (Constant), KAP, EXPERTKAP, SIZE, ACCTGED, EXPERTACCTG

b. Dependent Variable: PPAP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.011	5	.002	6.422	.000 ^a
	Residual	.012	36	.000		
	Total	.023	41			

a. Predictors: (Constant), KAP, EXPERTKAP, SIZE, ACCTGED, EXPERTACCTG

b. Dependent Variable: PPAP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.179	.058		-3.115	.004		
	ACCTGED	-.063	.018	-.621	-3.504	.001	.488	2.137
	EXPERTKAP	.013	.019	.107	.690	.494	.609	1.643
	EXPERTACCTG	.023	.018	.264	1.274	.211	.342	2.921
	SIZE	.007	.002	.516	3.728	.001	.766	1.306
	KAP	.005	.007	.102	.692	.493	.674	1.483

a. Dependent Variable: PPAP

Charts

Histogram

